

ABSTRAK

Belakangan ini masih sering terjadi kejadian yang merugikan konsumen penerbangan. Salah satunya adanya penolakan penerbangan. Kasus ini dialami oleh Regina Goenawan dan saudaranya yang ditolak untuk melakukan penerbangan oleh maskapai Air Asia karena adanya alasan yang tidak jelas. Dari kasus ini Regina mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tingkat pertama dan kedua, Hakim memutuskan dan menganggap bahwa gugatan Regina tidak jelas karena hubungan hukum antara Regina dan maskapai Air Asia terjadi karena adanya perjanjian. Oleh karenanya gugatan tersebut didasarkan atas wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Namun putusan pada tingkat kasasi, Hakim memutuskan tindakan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Air Asia merupakan perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah tindakan penolakan penerbangan oleh maskapai Air Asia telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 169/Pdt.G/2017/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pdt/2018/PT.BTN, dan Putusan Kasasi Nomor 975 K/Pdt/2019.

Hasil rumusan menunjukkan bahwa tindakan penolakan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Air Asia merupakan tindakan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan hukum antara Regina dan maskapai Air Asia yang bersumber pada perjanjian dalam hal ini adalah tiket penerbangan. Putusan hakim yang paling tepat dalam kasus ini terdapat dalam putusan tingkat pertama dan banding.

Kata Kunci: Penolakan Penerbangan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

ABSTRACT

Lately, events often occur that harm consumers of airlines. One of them is the refusal of flight. This case was experienced by Regina Goenawan and her siblings who were refused flights by Air Asia because of unclear reasons. From this case Regina filed a lawsuit in court on the basis of an illegal act. In the first and second level decisions, the Judge decided and considered that Regina's lawsuit was unclear because the legal relationship between Regina and Air Asia airlines occurred because of an agreement. Therefore the lawsuit is based on breach of contract, not an unlawful act. However, the verdict at the cassation level, the judge ruled that the actions taken by the airline Air Asia were illegal. The formulation of the problem in this research is whether the flight refusal actions by Air Asia airlines have fulfilled the elements of unlawful acts or defaults?

The method used in this research is normative legal research. The approach used is the statutory approach. This research is based on the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation Regulation Number 89 of 2015 concerning Handling of Delay Management in Business Entities Scheduled Commercial Air Transport in Indonesia, Tangerang District Court Decision Number 169 / Pdt.G / 2017 / PN.Tng, Banten High Court Decision Number 9 / Pdt / 2018 / PT.BTN, and Cassation Decision Number 975 K / Pdt / 2019. The results of the formulation show that the flight refusal action undertaken by Air Asia airlines is an act of default based on the legal relationship between Regina and the Air Asia airline which originated in the agreement in this case is the flight ticket. The most appropriate judge's decision in this case is in the first instance and appeal.

Keywords: Aviation Rejection, Unlawful Acts, Defaults